

STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK DAN AKSESIBILITAS INFORMASI DESA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PBB-P2 OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Rina Dwi Julianti ¹, Mulyadi Hamid ², Fitriana ³

^{1,3}Fakultas Pascasarjana Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Fajar.

email: rinadwijulianti3@gmail.com

email: mulyadi@unifa.ac.id

email: fitrianaunifa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta menelaah peran aksesibilitas informasi desa terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam kepada pejabat Bapenda, perangkat desa, dan wajib pajak di wilayah dengan akses terbatas. Data dianalisis melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang menekankan kejelasan pesan, penggunaan media berbasis komunitas, gaya persuasif-edukatif, serta komunikasi dua arah melalui forum desa dan layanan konsultasi berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan dan penerimaan PBB-P2. Keterbatasan akses jalan dan jaringan internet diatasi melalui pendekatan tatap muka, peran aktif perangkat desa, layanan jemput bola, dan pelayanan hybrid. Temuan ini menegaskan pentingnya komunikasi publik yang adaptif dan aksesibel dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: strategi komunikasi publik, aksesibilitas informasi, kepatuhan wajib pajak, bapenda kabupaten Nunukan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara mandiri. PAD menjadi indikator kemandirian fiskal sekaligus instrumen penguatan otonomi daerah pasca desentralisasi fiskal (Halimi, 2016). Salah satu komponen utama PAD adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kas daerah apabila dikelola secara optimal. Menurut Mardiasmo (2018), PBB-P2 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi keadilan fiskal karena berkaitan langsung dengan kepemilikan aset tetap masyarakat. Dengan demikian, optimalisasi PBB-P2 menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di tingkat lokal.

Namun demikian, berbagai tantangan masih menghambat optimalisasi penerimaan PBB-P2, terutama di wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks seperti Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya strategi komunikasi pemerintah daerah menjadi faktor yang mempengaruhi capaian penerimaan pajak (Halim & Abdullah, 2019). Huda dan Nugroho (2020) menegaskan bahwa sosialisasi dan pendekatan komunikatif berbasis komunitas lokal mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Rukmana dan Dewi (2021) juga menemukan bahwa keterlambatan pembaruan data objek pajak serta minimnya infrastruktur digital menjadi kendala utama dalam pengelolaan PBB-P2. Sementara itu, Sari dan Prasetyo (2022) menyimpulkan bahwa

peningkatan penerimaan pajak daerah sangat dipengaruhi oleh sinergi antara strategi komunikasi, transparansi, dan kemudahan aksesibilitas di wilayah terpencil. Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki kondisi geografis berupa pulau-pulau kecil dan desa-desa terpencil dengan keterbatasan infrastruktur jalan, jembatan, dan konektivitas digital (Arifin, 2020). Letak strategis di kawasan perbatasan memberikan potensi ekonomi yang besar, tetapi sekaligus menghadirkan tantangan administratif dalam pelayanan publik, termasuk pengelolaan pajak daerah (Simanjuntak, 2016). Keterbatasan akses transportasi dan komunikasi berdampak pada pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), sosialisasi, serta proses pembayaran pajak.

Secara empiris, penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Nunukan masih belum optimal, terutama di desa-desa dengan akses terbatas. Rahman dan Fitriani (2021) mencatat bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak menerima SPPT secara tepat waktu. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi pajak masyarakat desa (Nugraha & Darmawan, 2020). Hakim dan Lestari (2022) menyatakan bahwa wilayah terpencil memerlukan pendekatan komunikasi pajak yang adaptif dan berbasis kebutuhan lokal. Yusuf (2023) menambahkan bahwa keterbatasan petugas lapangan dan belum optimalnya kolaborasi dengan pemerintah desa turut memperlambat pembaruan data objek pajak. Dalam perspektif teori komunikasi, strategi komunikasi publik merupakan pendekatan sistematis dalam menyampaikan pesan organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Menurut Pace dan Faules (2010), komunikasi publik yang efektif ditandai dengan pesan yang jelas, tepat sasaran, dan mudah dipahami audiens. Dalam konteks pemerintahan daerah, strategi komunikasi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan edukatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Siagian, 2014). Hartono dan Puspitasari (2021) menemukan bahwa pendekatan dialog langsung, penggunaan media visual, serta bahasa lokal efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat desa. Yunita dan Prakoso (2020) juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis budaya lokal dalam membangun kepercayaan publik.

Di sisi lain, aspek aksesibilitas wilayah juga menjadi faktor krusial. Sutami (2017) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur jalan dan transportasi berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. Nasution (2015) menegaskan bahwa pemerataan infrastruktur dalam era otonomi daerah menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses hak dan melaksanakan kewajiban fiskal secara adil. Sari dan Widjaja (2020) menunjukkan bahwa desa dengan akses jalan terbatas cenderung mengalami keterlambatan pembayaran pajak. Handayani dan Nugroho (2021) menambahkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital dan sinyal internet menghambat efektivitas sosialisasi pajak berbasis daring. Ketimpangan akses ini berdampak pada ketidakmerataan penerimaan PBB-P2 antarwilayah (Fitriyani & Azhari, 2022; Ridwan & Maulana, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara strategi komunikasi publik dan peningkatan aksesibilitas informasi desa dalam rangka meningkatkan penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Nunukan. Sinergi kedua aspek tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berkeadilan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi komunikasi publik Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2?
2. Bagaimana aksesibilitas informasi desa dalam menunjang partisipasi dan kepatuhan wajib pajak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis peran strategi komunikasi publik badan pendapatan daerah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2 di desa-desa kabupaten Nunukan
2. Mengkaji aksesibilitas informasi desa yang meliputi infrastruktur jalan, transportasi, dan teknologi informasi dalam menunjang efektivitas pelayanan serta penerimaan PBB-P2.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan Rekomendasi kebijakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam merancang strategi komunikasi yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat desa.
- b. Menjadi dasar pengembangan infrastruktur pelayanan pajak di wilayah terpencil, baik dari aspek komunikasi maupun akses fisik.
- c. Membantu pemerintah desa dan petugas pajak dalam menerapkan pendekatan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

2. Manfaat akademis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi publik dalam konteks perpajakan daerah, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan.
- b. Memperkaya literatur mengenai hubungan antara aksesibilitas wilayah dan efektivitas pelayanan publik.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait strategi peningkatan PAD melalui pendekatan komunikasi dan pemerataan akses.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipengaruhi oleh faktor komunikasi, aksesibilitas wilayah, kualitas pelayanan, serta tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak.

Hartono dan Puspitasari (2021) menemukan bahwa sosialisasi pajak dengan pendekatan langsung serta penggunaan bahasa lokal efektif meningkatkan kepatuhan masyarakat desa. Penelitian ini menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang kontekstual dan dekat dengan masyarakat. Namun, studi tersebut belum mengaitkan temuan dengan faktor aksesibilitas wilayah atau kondisi geografis perbatasan.

Fitriyani dan Azhari (2022) menunjukkan bahwa desa dengan akses terbatas cenderung memiliki tingkat tunggakan PBB-P2 lebih tinggi dibanding desa dengan akses baik. Temuan ini menyoroti pentingnya aspek infrastruktur dan aksesibilitas dalam mendukung efektivitas penerimaan pajak, meskipun tidak membahas strategi komunikasi sebagai variabel utama.

Yunita dan Prakoso (2020) mengkaji komunikasi lintas budaya dalam pelayanan publik di wilayah terpencil. Hasilnya menunjukkan bahwa komunikasi yang tidak disesuaikan dengan konteks budaya lokal menjadi hambatan signifikan dalam pelayanan. Penelitian ini relevan dalam memperkuat urgensi penyesuaian strategi komunikasi, meskipun tidak secara spesifik membahas PBB-P2.

Rahman dan Fitriani (2021) meneliti kendala penagihan PBB-P2 di Kabupaten Nunukan dan menemukan bahwa distribusi SPPT yang terhambat, minimnya sosialisasi, serta akses jalan yang buruk menjadi faktor penghambat utama peningkatan penerimaan. Studi ini relevan secara konteks wilayah, namun belum mengulas strategi komunikasi sebagai solusi sistemik.

Penelitian Maulana dkk. (2024) menyoroti tata kelola layanan PBB-P2 daring dan menyimpulkan bahwa kanal digital dapat meningkatkan kemudahan layanan apabila didukung tata kelola dan responsivitas yang baik. Putri (2025) menemukan bahwa perangkat desa berperan penting sebagai penghubung komunikasi dan pengingat kewajiban pajak. Wulandari dan Wahyudi (2022) serta Lologau (2024) menegaskan bahwa pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan kualitas pelayanan berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, Al'libani dkk. (2024) serta Kurniawan (2018) menekankan bahwa efektivitas pemungutan PBB-P2 dipengaruhi oleh kualitas sosialisasi, pembaruan data objek pajak, dan hambatan teknis di lapangan.

Secara umum, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga komunikasi, aksesibilitas, kualitas pelayanan, serta faktor sosial-budaya. Namun, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan strategi komunikasi publik

dan aksesibilitas informasi desa secara simultan dalam konteks wilayah perbatasan seperti Kabupaten Nunukan. Celah inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Konsep dan Teori

1. Konsep Komunikasi

Komunikasi merupakan proses dinamis pertukaran makna melalui pesan verbal maupun nonverbal. Adler dkk. (2020) menjelaskan bahwa komunikasi melibatkan unsur sumber, pesan, media, penerima, umpan balik, dan gangguan (*noise*). Keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan isi pesan, tetapi juga kesesuaian media, konteks sosial-budaya, dan adanya dialog dua arah. Dalam konteks organisasi publik, komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi, edukasi, dan pembentukan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan. Komunikasi dua arah menjadi penting untuk membangun pemahaman serta legitimasi kebijakan publik.

2. Konsep Komunikasi Publik

Komunikasi publik merupakan proses penyampaian pesan dari lembaga kepada khalayak luas untuk tujuan informatif, persuasif, dan partisipatif (Effendy, 2017; Cangara, 2016). Dalam pemerintahan, komunikasi publik berfungsi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. OECD menekankan bahwa komunikasi publik modern harus bersifat dialogis, bukan satu arah, dengan dukungan mekanisme umpan balik. Komunikasi publik yang efektif juga berorientasi pada pembangunan kepercayaan publik melalui pesan yang jelas, etis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3. Strategi Komunikasi Publik

Strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu (Effendy, 2014). Strategi tidak hanya memberikan arah, tetapi juga taktik operasional yang menyesuaikan situasi dan kondisi. Model Lasswell (1948) merumuskan komunikasi melalui pertanyaan: *Who says what in which channel to whom with what effect*. Model ini menekankan pentingnya sumber, pesan, saluran, audiens, dan dampak. Model *Two-Way Symmetrical* dari Grunig dan Hunt (1984) menekankan komunikasi dua arah yang seimbang antara organisasi dan publik. Sementara itu, pendekatan partisipatif (Servaes, 2002) menekankan pelibatan masyarakat dalam perencanaan hingga evaluasi komunikasi. Dalam pelayanan pajak daerah, strategi komunikasi publik mencakup penentuan tujuan (edukasi dan persuasi), segmentasi audiens desa, penyesuaian pesan dengan budaya lokal, pemilihan media (tatap muka, forum desa, media digital), serta evaluasi efektivitas komunikasi.

4. Konsep Aksesibilitas Informasi Desa

Aksesibilitas informasi desa merujuk pada kemampuan masyarakat menjangkau layanan publik secara fisik maupun digital. Sutami (2017) membagi aksesibilitas menjadi akses fisik (jalan, transportasi) dan akses digital (jaringan komunikasi dan teknologi informasi). Tingkat aksesibilitas memengaruhi distribusi informasi, efisiensi pelayanan, serta kepatuhan fiskal masyarakat. Rendahnya aksesibilitas menyebabkan keterlambatan distribusi SPPT, kesulitan pembayaran pajak, dan rendahnya partisipasi dalam sosialisasi. Oleh karena itu, aksesibilitas menjadi faktor struktural yang menentukan efektivitas strategi komunikasi publik dalam pelayanan PBB-P2.

5. Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response)

Penelitian ini Menggunakan Teori S-O-R dari Hovland, Janis, dan Kelley (1953) sebagai landasan analisis. Teori ini menjelaskan bahwa:

- a. Stimulus (S) : strategi komunikasi publik dan penyuluhan pajak yang diberikan pemerintah
- b. Organism (O) : Wajib pajak sebagai penerima pesan yang memproses informasi berdasarkan persepsi, pengalaman, dan kondisi sosialnya.
- c. Response (R) : kepatuhan dan partisipasi wajib pajak dalam membayar PBB-P2

Teori ini relevan karena menjelaskan hubungan antara komunikasi pemerintah (stimulus), kondisi internal masyarakat desa (organism), dan perilaku kepatuhan pajak (response). Dukungan aksesibilitas informasi desa memperkuat efektivitas stimulus sehingga respons yang dihasilkan lebih positif.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan konsep dan teori di atas, penelitian ini memandang bahwa strategi komunikasi publik yang adaptif dan partisipatif akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Efektivitas strategi tersebut sangat dipengaruhi oleh aksesibilitas informasi desa, baik secara fisik maupun digital. Sinergi antara komunikasi dan penerimaan PBB-P2 di kabupaten Nunukan

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dengan metode deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang berkaitan dengan strategi komunikasi publik dan aksesibilitas desa dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2. Penelitian kualitatif berfokus pada pemaknaan, interpretasi, serta pemahaman terhadap realitas sosial berdasarkan perspektif subjek penelitian. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan serta hambatan aksesibilitas desa yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk mengungkap fakta empiris di lapangan melalui proses pengumpulan dan analisis data secara mendalam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Nunukan serta beberapa desa yang menjadi wilayah objek pemungutan PBB-P2. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi dengan fokus penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus hingga September 2025.

C. Informan penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Pejabat Badan Pendapatan Daerah kabupaten Nunukan (kepala bidang pajak dan staf penyuluh)
2. Perangkat desa di wilayah pemungutan PBB-P2
3. Masyarakat wajib pajak yang tinggal di desa-desa dengan akses terbatas.

D. Jenis dan Sumber data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap informan penelitian. Data ini berupa informasi, pengalaman, serta pandangan informan mengenai strategi komunikasi dan aksesibilitas desa dalam konteks PBB-P2.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas fokus penelitian, konsep-konsep utama didefinisikan sebagai berikut :

1. Strategi komunikasi publik adalah upaya terencana yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah dalam menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait PBB-P2 kepada masyarakat.
2. Aksesibilitas desa adalah kondisi kemudahan atau hambatan geografis dan infrastruktur yang memengaruhi distribusi informasi dan pelaksanaan pembayaran PBB-P2
3. Kepatuhan wajib pajak adalah tingkat kesadaran dan kemauan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Wawancara semi terstruktur, untuk memperoleh informasi mendalam dari informan penelitian.
2. Observasi, untuk mengamati secara langsung kondisi lapangan dan aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi, untuk mengumpulkan dokumen pendukung seperti laporan, arsip, dan foto kegiatan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan :

1. Pengumpulan data, yaitu menghimpun seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi yaitu proses interpretasi data untuk menemukan pola dan makna sesuai rumusan masalah.

H. Pengecekan Validitas Data

Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai informan dan dokumen. Selain itu, dilakukan uji kepastian (*confirmability*) dengan menelusuri kembali proses pengumpulan dan analisis data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan, perangkat desa, dan masyarakat wajib pajak PBB-P2, serta melalui observasi dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana model Miles & Huberman.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi komunikasi publik yang diterapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan dalam sosialisasi PBB-P2 meliputi empat aspek utama, yaitu: penyusunan pesan, pemilihan media komunikasi, gaya penyampaian, serta partisipasi audiens.

1. Penyusunan pesan
Pesan komunikasi publik yang disampaikan Bapenda bersifat edukatif dan persuasif. Edukatif karena menjelaskan prosedur pembayaran, batas waktu, dan tata cara membaca SPPT. Persuasif karena menekankan manfaat pajak bagi pembangunan desa.
2. Pemilihan media
Media komunikasi yang digunakan bersifat hibrida, meliputi :
 - a. SPPT dan surat pemberitahuan
 - b. Pertemuan desa
 - c. Pengumuman di tempat ibadah
 - d. Komunikasi dari rumah ke rumah
 - e. Media sosial resmiMedia tata muka dinilai paling efektif pada desa dengan keterbatasan akses internet.
3. Gaya penyampaian (Delivery Style)
Gaya komunikasi yang diterapkan bersifat kombinitif
 - a. Persuasif (ajakn dan pendekatan humanis)
 - b. Edukatif (penjelasan teknis prosedur)
 - c. Instruktif (penegasan tenggat waktu)
4. Partipasi Audiens (*Two way Communication*)
Komunikasi yang dilakukan bersifat dua arah melalui :
 - a. Sesi tanya jawab
 - b. Klarifikasi data SPPT
 - c. Konsultasi langsung

d. Perantara perangkat desa
Partisipasi ini meningkatkan kepercayaan dan mengurangi kebingungan wajib pajak.

| No | Aspek Strategi | Temuan Lapangan | Dampak |
|----|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. | Penyusunan Pesan | Edukatif & persuasif | Meningkatkan pemahaman |
| 2. | Media Komunikasi | Tatap muka & komunitas | Informasi lebih cepat diterima |
| 3. | Gaya Penyampaian | Kombinatif | Mengurangi resistensi |
| 4. | Partisipasi Audiens | Komunikasi dua arah | Meningkatkan kepercayaan |

Selain strategi komunikasi, penelitian juga menemukan bahwa aksesibilitas desa menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kepatuhan dan penerimaan PBB-P2. Desa dengan akses jalan dan jaringan internet yang baik menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibanding desa dengan keterbatasan infrastruktur.

B. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nunukan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2. Pengaruh tersebut terjadi melalui penguatan pemahaman, peningkatan kepercayaan, serta kemudahan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep komunikasi publik yang menekankan pentingnya pesan yang jelas, saluran yang tepat, dan komunikasi dua arah dalam membangun partisipasi masyarakat. Hartono & Puspitasari (2021) menyatakan bahwa sosialisasi pajak di desa menjadi lebih efektif ketika menggunakan pendekatan langsung dan bahasa yang mudah dipahami. Temuan penelitian ini memperkuat hasil tersebut, karena komunikasi tatap muka terbukti lebih efektif dibanding hanya mengandalkan media tertulis.

Selain itu, Yunita & Prakoso (2020) menegaskan bahwa komunikasi pelayanan publik di wilayah terpencil harus disesuaikan dengan konteks lokal. Dalam penelitian ini, pendekatan berbasis komunitas dan keterlibatan perangkat desa menunjukkan efektivitas dalam menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi administrasi dan akses digital.

Dari sisi aksesibilitas, hasil penelitian juga selaras dengan Fitriyani & Azhari (2022) yang menemukan bahwa desa dengan akses terbatas cenderung memiliki tunggakan PBB-P2 lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang baik harus didukung oleh kemudahan akses layanan. Komunikasi tanpa akses yang memadai berpotensi menghasilkan kepatuhan tertunda.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PBB-P2 tidak hanya ditentukan oleh intensitas penagihan, tetapi oleh kualitas komunikasi publik yang adaptif terhadap kondisi desa. Ketika pesan disusun secara sederhana, media disesuaikan dengan akses masyarakat, gaya penyampaian humanis, dan tersedia ruang dialog, maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Dengan demikian, strategi komunikasi publik yang terintegrasi dengan peningkatan aksesibilitas layanan menjadi kunci dalam mendorong partisipasi dan kepatuhan wajib pajak di wilayah pedesaan Kabupaten Nunukan.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa :

1. Strategi komunikasi publik yang diterapkan badan pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan PBB-P2 melalui penyusunan pesan yang jelas dan kontekstual, pemilihan media yang sesuai dengan kondisi desa, gaya penyampaian persuasif-edukatif serta penerapan komunikasi dua arah. Strategi ini meningkatkan pemahaman dan kepercayaan wajib

- pajak, mengurangi kebingungan prosedural, serta mendorong kepatuhan sukarela, sehingga berkontribusi pada peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2.
2. Aksesibilitas informasi desa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi dan kepatuhan wajib pajak, karena informasi yang mudah dijangkau, mudah dipahami, dan dapat ditindaklanjuti mendorong warga untuk aktif bertanya, mengonfirmasi, dan membayar tepat waktu. Dukungan perangkat desa, komunikasi tatap muka, serta pendampingan layanan menjadi kunci dalam mengatasi keterbatasan akses geografis dan digital, sehingga partisipasi meningkat dan kepatuhan pembayaran PBB-P2 lebih terjaga.
- B. Saran
1. Penguatan inovasi komunikasi dan pemerataan akses informasi Penelitian ini masih terbatas pada pendekatan kualitatif dan bergantung pada persepsi informan, sehingga disarankan agar Badan Pendapatan Daerah memperkuat inovasi komunikasi publik yang terukur dan merata, khususnya pada desa dengan keterbatasan akses. Pengembangan sistem pengingat terpadu, penyederhanaan materi sosialisasi, serta pemetaan desa berdasarkan tingkat akses informasi dan kepatuhan pajak perlu dilakukan agar strategi komunikasi dapat lebih tepat sasaran dan berdampak konsisten pada peningkatan penerimaan PBB-P2.
 2. Pengembangan penelitian lanjutan berbasis data kuantitatif dan longitudinal. Mengingat penelitian ini belum mengaitkan secara langsung strategi komunikasi dan aksesibilitas dengan data realisasi penerimaan PBB-P2 dalam jangka waktu tertentu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran dengan analisis data penerimaan 2–3 tahun dan perbandingan antar wilayah desa. Pendekatan ini akan memperkuat validitas temuan serta memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai besaran pengaruh komunikasi publik dan aksesibilitas terhadap kepatuhan dan penerimaan pajak daerah.

REFERENSI

- Abbas, A. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Teori dan praktik lapangan*. Makassar: CV Nur Lina Press.
- Arifin, A. (2020). *Pembangunan Daerah Perbatasan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods* (5th ed.). Boston, MA: Pearson Education.
- Effendy, O. U. (2014). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fitriani, N., & Widodo, A. (2022). Kendala Komunikasi Petugas Pajak dalam Melayani Masyarakat Perdesaan. *Jurnal Administrasi dan Reformasi*, 11(3), 89100.
- Fitriyani, S., & Azhari, D. (2022). Ketimpangan Akses dan Ketimpangan Penerimaan PBB-P2 di Daerah Tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Daerah*, 8(2), 6778.
- HM. (2011). *Etika komunikasi lintas budaya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hakim, M. R., & Fitriani, L. (2022). Dimensi Aksesibilitas dalam Optimalisasi Pelayanan Pajak Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 11(2), 92104. <https://doi.org/10.31289/japk.v11i2.5776>
- Hakim, M., & Lestari, W. (2022). Strategi Komunikasi Pajak di Wilayah Terpencil: Sebuah Pendekatan Partisipatif. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 11(1), 4052.

- Halim, A., & Abdullah, S. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pajak Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 153162.
- Halimi, S. (2016). *Keuangan Daerah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, L., & Nugroho, R. (2021). *Tantangan Sosialisasi Pajak Digital di Wilayah Minim Sinyal. Jurnal Transformasi Digital dan Pemerintahan*, 3(2), 4556.
- Hartono, Y., & Puspitasari, D. (2021). Efektivitas Strategi Sosialisasi Pajak kepada Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Publik*, 5(2), 112124. <https://doi.org/10.25077/jikp.5.2.112-124.2021>
- Hartono, Y., & Puspitasari, D. (2021). Efektivitas Strategi Sosialisasi Pajak kepada Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Publik*, 5(2), 112124.
- Hasiholan, M. D., Siregar, Y. M., & Sinaga, H. P. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif: Panduan praktis untuk penelitian sosial*. Medan: Widina Bhakti Persada Medan.
- Hovland, C. I., Janis, I. L., & Kelley, H. H. (1953). *Communication and persuasion: Psychological studies of opinion change*. New Haven: Yale University Press.
- Huda, M., & Nugroho, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 3342.
- Kusumawardani, F., & Hidayat, R. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Sosialisasi Pajak Daerah. *Jurnal Komunikasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 5566. <https://doi.org/10.33005/jkkg.v8i1.315>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasution, A. (2015). *Ekonomi Infrastruktur dan Desentralisasi Fiskal*. Jakarta: LP3ES.
- Nugraha, R., & Darmawan, Y. (2020). Pengaruh Keterbatasan Akses Informasi terhadap Kepatuhan Pajak Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 8997.
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (2010). *Komunikasi Organisasi: Strategi Meningkatkan Kinerja Karyawan*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Pohan, S. K., & Fitria, T. N. (2021). Pemilihan media komunikasi dalam strategi penyampaian informasi kepada masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media*, 4(1), 2230. <https://doi.org/10.31289/jikm.v4i1.5432>
- Prasetyo, A., & Nugroho, A. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Pajak Melalui Komunikasi Pemerintah Daerah Berbasis Data. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 9(2), 88101. <https://doi.org/10.22146/japi.9.2.88>
- Rahman, A., & Fitriani, D. (2021). Kendala Penagihan Pajak PBB-P2 di Daerah Terpencil: Studi Kasus Kabupaten Nunukan. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 9(1), 2534.

- Ridwan, A., & Maulana, A. (2023). Konektivitas Wilayah dan Kinerja Pajak Daerah: Kajian Empiris di Kalimantan. *Jurnal Administrasi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 1226.
- Rukmana, D., & Dewi, K. (2021). Analisis Kendala Penerimaan PBB-P2 di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 2130.
- Saleh, M., & Sihite, A. (2020). *Pengantar metode penelitian: Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Makassar: CV Nur Lina.
- Sari, D. P., & Wulandari, E. (2021). Pengaruh Aksesibilitas terhadap Kepatuhan Pajak di Wilayah Terpencil. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(1), 4556. <https://doi.org/10.31289/jian.v8i1.3875>
- Sari, D., & Widjaja, B. (2020). Pengaruh Infrastruktur Transportasi terhadap Kepatuhan Pajak di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Ilmu Kebijakan Publik*, 5(1), 2334.
- Sari, R., & Prasetyo, E. (2022). Integrasi Komunikasi Pajak dan Infrastruktur Digital dalam Meningkatkan Penerimaan Daerah. *Jurnal Kebijakan Fiskal Daerah*, 5(2), 112125.
- Siagian, S. P. (2014). *Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simanjuntak, S. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siregar, M. Y., & Azizah, S. N. (2023). Tantangan Komunikasi Publik di Wilayah Perbatasan: Studi pada Strategi Pajak PBB-P2. *Jurnal Studi Pemerintahan Daerah*, 7(1), 2234. <https://doi.org/10.21009/jspd.07103>
- Sutami, H. (2017). *Infrastruktur untuk Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Turner, H. (2016). *Teori-teori etika modern: Tinjauan filsafat moral*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyudin, A. (2016). *Etika komunikasi dan media dalam masyarakat informasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahyuni, T., & Hidayat, S. (2023). Analisis Efektivitas Komunikasi Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Pajak di Daerah Terpencil. *Jurnal Studi Pemerintahan Daerah*, 7(1), 3548.
- Wibisono, S., & Maharani, L. (2020). Ketimpangan Infrastruktur dan Kinerja Fiskal Daerah Tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 5(3), 111122. <https://doi.org/10.14710/jepd.5.3.111-122>
- Yunita, R., & Prakoso, A. (2020). Komunikasi Lintas Budaya dalam Pelayanan Publik di Wilayah Terpencil. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 8(1), 6776.
- Yusuf, A. (2023). Efektivitas Pendataan Pajak PBB-P2 di Wilayah Perbatasan: Studi di Kalimantan Utara. *Jurnal Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Daerah*, 6(1), 1427.

Yusuf, A. R., & Prasetyo, R. A. (2023). Sistem Informasi dan Aksesibilitas Pelayanan Pajak di Desa Terpencil. *Jurnal Transformasi Digital dan Kebijakan Publik*, 4(1), 6778. <https://doi.org/10.21009/jtdkp.04107>